

ANALISIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KABUPATEN SOPPENG

Oleh:

Idayanti Nursyamsi¹⁾, Mahlia Muis¹⁾

Email: idayanti_uh@yahoo.com

¹⁾Staf Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin

ABSTRACT

Gender equality and empowerment of women as one of the Millennium Development Goals (MDG), as well as to uncover the reality of inequality and discrimination against women in social, economic, educational, legal and other aspects. This study aims to analyze the empowerment of women (women empowerment) in Soppeng, South Sulawesi Province. Analyzer used the descriptive analysis. The data used are secondary data from the Local Government Soppeng, which are then analyzed descriptively based on a gender perspective. Descriptive analysis showed that the education sector, the economy, and the public sector is more dominated by men than women, so that women's participation is still low.

Keywords: *Women empowerment, the education sector, economic sector, and public sector.*

I. PENDAHULUAN

Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu perhatian khusus bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA) yang senantiasa melakukan upaya dalam peningkatan kualitas dan kesetaraan gender baik di level pusat maupun pada tingkat daerah di seluruh Indonesia. Adanya konsep pemberdayaan perempuan yang digagas dan dilaksanakan oleh pemerintah merupakan salah satu strategi afirmasi dalam mewujudkan kesetaraan gender yang dapat berimplikasi secara nyata terhadap peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai pembangunan, meningkatkan pemenuhan hak-hak perempuan atas perlindungan dari tindak kekerasan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2011).

Terkait dengan program pemberdayaan perempuan oleh pemerintah, adanya budaya patriarki yang masih kuat di kalangan masyarakat Indonesia menjadi salah satu faktor penghambat bagi pemberdayaan perempuan (Hastuti dan Respati, 2009). Lubis (2010) dalam papernya memaparkan secara konkret tentang kendala yang dihadapi program pemberdayaan perempuan, kendala tersebut diantaranya kaum perempuan dianggap warga negara kelas dua, dengan stigma tersebut yang menjadi kendala bagi perempuan untuk aktif di dunia politik. Diskriminasi terhadap kaum perempuan juga dikemukakan oleh Khotimah (2009), bahwa faktor modernitas menyebabkan adanya marginalisasi dalam pekerjaan sehingga minimnya perlindungan hukum dan perempuan diberi upah rendah. Persamaan gender seharusnya tidak diinterpretasikan secara dangkal oleh masyarakat. Gender merupakan kategorisasi kultural dan hirarki yang memiliki standar tertentu dalam pembagian divisi kerja berdasarkan jenis kelamin

(Zerzan, 2010). Dalam temuan Ali (2013) bahwa pemberdayaan bukanlah menunjukkan kekuasaan mutlak atas orang lain, pemberdayaan perempuan merupakan salah satu strategi agar mereka merasa lebih aman dan dihargai. Demikian pula penelitian Kevany dan Huisingh (2013); Garikipati (2012); Dibie dan Dibie (2012); Latu dkk (2013); Oyelude dkk (2013); Setyaningsih (2012); Suja (2012); Metcalfe (2011); dan Ushma (2012) yang memaparkan kajian tentang *women empowerment*.

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, maka perlu dikembangkan kebijakan yang responsif gender. Salah satu strategi untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Hal ini dipertegas dengan diterbitkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa seluruh departemen maupun lembaga pemerintah non-departemen di pemerintah nasional, provinsi maupun kabupaten/kota harus melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pada kebijakan dan program pembangunan. Dengan mengidentifikasi kondisi dan posisi perempuan maupun laki-laki, melalui analisis informasi tentang profil gender khususnya di Kabupaten Soppeng menjadi kajian dalam pengembangan program pemberdayaan perempuan.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Konsep Gender

Istilah gender selama ini banyak salah ditafsirkan oleh masyarakat. Istilah gender berarti suatu perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun bukan perbedaan secara biologis (Oakley, 1972). Namun, Caplan (1987) menjelaskan gender adalah perilaku yang berbeda antara laki-laki dan perempuan akibat proses sosial dan budaya setempat. Gender dianggap sebagai sifat yang secara alami dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Fakih, (2008) mengungkapkan terjadinya ketidakadilan gender merupakan suatu keadaan dimana kaum laki-laki maupun perempuan mejadi korban atas ketidakadilan yang dialami baik itu dari aspek-aspek dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan sifat perempuan yang emosional dibandingkan laki-laki sehingga muncul stereotip bahwa perempuan tidak dapat menjadi pemimpin. Konsep gender pada umumnya diasosiasikan kepada kaum perempuan karena masyarakat menganggap isu gender hanya berlaku untuk perempuan. Konsep gender ini banyak ditentang oleh laki-laki bahkan ada pula perempuan yang juga ikut menentang konsep ini. Perbedaan gender dan budaya patriarki pada umumnya berdampak pada konflik antara laki-laki dengan perempuan, dimana perempuan sebagai korban.

2.2. Konsep Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan menurut Nugroho (2008) memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kompetensi perempuan ketika menjalankan program pembangunan, sebagai subjek yang aktif dalam pembangunan
- b) Meningkatkan kemampuan secara kualitas maupun kuantitas bagi perempuan dalam hal kepemimpinan. Kemampuan untuk terlibat dalam hal perencanaan, pelaksana, monitoring dan evaluasi dalam setiap program pembangunan

- c) Meningkatkan kemampuan pihak perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga serta membuka peluang untuk lebih produktif dan mandiri
- d) Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di berbagai level sebagai wadah pemberdayaan perempuan sehingga dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan.

Program-program yang memberdayakan perempuan menurut Nugroho (2008) diantaranya:

- a) Penguatan organisasi kelompok perempuan di segala tingkat mulai dari pedesaan hingga tingkat nasional
- b) Peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan dalam pemasaran sosial program-program pemberdayaan
- c) Pelibatan kelompok perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring semua program pembangunan yang ada.
- d) Peningkatan kemampuan kepemimpinan perempuan, agar mempunyai posisi tawar menawar yang setara serta memiliki akses dan peluang untuk terlibat dalam pembangunan
- e) Peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha dengan berbagai keterampilan yang menunjang.

III. METODOLOGI

Tipe penelitian yang digunakan dalam mengkaji *women empowerment* adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen Kabupaten Soppeng yang mengacu pada analisis gender, data tersebut diantaranya data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan umur; jumlah guru; jumlah buta huruf; tenaga kesehatan; jumlah angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka; jumlah anggota DPRD; jumlah PNS; jumlah praktisi hukum; jumlah personil TNI dan Polisi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis pemberdayaan perempuan di Kabupaten Soppeng, maka diuraikan berdasarkan sektor kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan publik.

4.1. Sektor Kependudukan

Rincian mengenai jumlah dan persentase penduduk menurut jenis kelamin yang terdapat di Kabupaten Soppeng pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 1 yang menggambarkan persentase jumlah penduduk Kabupaten Soppeng menurut jenis kelamin.

Tabel 1.

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin tahun 2010

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin				Total	%
		LK	%	PR	%		
1	Marioriwawo	20.701	46,72	23.609	53,28	44.310	19,42
2	Liliriaja	12.659	46,95	14.305	53,05	26.964	11,82
3	Lilirilau	17.952	47,99	20.250	53,01	38.202	16,74
4	Lalabata	21.287	48,09	22.982	51,91	44.269	19,40
5	Marioriawa	13.332	47,85	14.529	52,15	27.861	12,21
6	Donri-Donri	10.700	46,68	12.220	53,32	22.920	10,04
7	Ganra	5.190	45,93	6.111	54,07	11.302	4,95
8	Citta	3.615	45,19	4.384	54,81	7.999	3,31
	Jumlah	105.436	47,11	118.390	52,89	223.826	100

Sumber : Kab. Soppeng dalam angka, 2011

Secara umum kecamatan yang paling padat penduduknya di Kabupaten Soppeng adalah Kecamatan Marioriwawo yaitu 44.310 jiwa (19,42%). Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa penduduk di Kab. Soppeng yang tersebar di delapan kecamatan, rata-rata memiliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki.

4.2. Sektor Pendidikan

4.2.1. Jumlah Tenaga Pengajar

Keberadaan sumber daya manusia dalam hal ini tenaga pengajar atau guru merupakan hal yang tidak terlepas dalam dunia pendidikan. Karena guru merupakan tolak ukur dalam peningkatan kecerdasan kualitas murid. Jumlah guru yang menangani murid diupayakan maksimal 40 orang guna melakukan proses belajar mengajar dan penagawasan yang lebih terarah dan fokus sehingga diharapkan murid dapat memperoleh ilmu dan menjalani pendidikan mereka dengan suasana yang lebih kondusif. Tabel 2 menyajikan jumlah guru menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Soppeng.

Tabel 2.

Jumlah Guru Berdasarkan Kecamatan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2011

Kecamatan	Tingkat Pendidikan												Total	%
	TK			SD/MI			SLTP/MTs			SLTA/SMA				
	LK	PR	Jml	LK	PR	Jml	LK	PR	Jml	LK	PR	Jml		
Marioriwawo	0	47	47	161	426	587	66	137	203	33	33	66	903	16,96
Liliriaja	0	48	48	70	286	356	74	139	213	57	76	133	750	14,09
Lilirilau	0	60	60	153	348	501	34	141	175	18	30	48	784	14,73
Lalabata	0	75	75	121	371	492	63	210	273	220	236	456	1.296	24,34
Marioriawa	0	13	13	94	233	327	45	110	155	44	50	94	589	11,06
Donri-Donri	0	34	34	87	256	343	18	105	123	21	24	45	545	10,24
Ganra	0	8	8	40	106	146	13	64	77	1	7	8	239	4,49
Citta	0	15	15	32	91	123	23	46	69	5	6	11	218	4,09
Total	0	300	300	758	2.117	2.875	336	952	1.288	399	462	861	5.324	100,00

Sumber : Kab. Soppeng dalam angka, 2011

Berdasarkan Tabel 2, bahwa jumlah guru di Kabupaten Soppeng sebanyak 5.324 orang diantaranya guru pada jenjang TK sebanyak 300 orang (5,63%), jenjang pendidikan SD/MI sebanyak 2.875 orang (54,00%), jenjang pendidikan SMP/MTs sebanyak 1.288 orang (24,19%) dan jumlah guru jenjang pendidikan SMA/MA sebanyak 861 orang (16,17%) yang tersebar di delapan kecamatan. Pada semua jenjang pendidikan mulai TK sampai SLTA/MA jumlah guru perempuan lebih banyak di banding laki-laki.

Dari data tersebut dapat pula dianalisis jumlah guru berdasarkan kecamatan, guru terbanyak di Kecamatan Lalabata dengan jumlah 1.296 orang (24,34%) diantaranya guru TK sebanyak 75 orang, guru SD/MI sebanyak 492 orang, jenjang pendidikan SLTP/Ms sebanyak 273 orang dan guru jenjang pendidikan SMA/MA sebanyak 456 orang, hal ini sesuai karena pada kecamatan ini juga dengan jumlah murid yang paling banyak. Sementara jumlah guru paling sedikit di Kecamatan Citta diantaranya guru TK 15 orang, Guru SD/MI 123 orang, guru SLTP/MTs 69 orang dan guru SLTA/MA 11 orang.

4.2.2. Jumlah Buta Huruf

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mencerdaskan penduduk Indonesia, seperti melalui pendidikan secara formal maupun informal. Akan tetapi kenyataannya masih ada juga yang belum atau tidak sempat menikmati pendidikan ataupun putus sekolah karena sesuatu hal seperti kesulitan biaya, letak sekolah yang sulit terjangkau, pandangan yang keliru tentang pendidikan sehingga mengakibatkan adanya penduduk yang tidak mampu atau tidak dapat membaca dan menulis. Jumlah penduduk yang tidak dapat/mampu membaca dan menulis huruf baik huruf latin maupun huruf lainnya digolongkan ke dalam penduduk yang buta huruf. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah buta huruf pada setiap kecamatan baik laki-laki maupun perempuan di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3.

Jumlah Buta Huruf Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin

No.	Kecamatan	Jumlah Buta Huruf				Total	%
		LK	%	PR	%		
1	Marioriwawo	38	38,00	62	62,00	100	16,92
2	Liliriaja	7	12,28	50	87,72	57	9,64
3	Lilirilau	76	47,50	84	52,50	160	27,07
4	Lalabata	48	45,71	57	54,29	105	17,77
5	Marioriawa	10	50,00	10	50,00	20	3,38
6	Donri-Donri	0	0,00	30	100,00	30	5,08
7	Ganra	25	42,37	34	57,63	59	9,98
8	Citta	27	45,00	33	55,00	60	10,15
TOTAL		231	39,09	360	60,91	591	100

Sumber : Kab. Soppeng dalam angka, 2011

Pada Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk buta huruf sebanyak 591 orang, dari jumlah tersebut yang paling banyak adalah Kecamatan Lilirilau sebanyak 160 orang (27,07%), menyusul Kecamatan Lalabata sebanyak 105 orang (17,77%). Sedangkan jumlah buta huruf terendah adalah Kecamatan Marioriawa yaitu sebanyak 20 Orang (3,38%). Persentase perempuan yang buta huruf tertinggi di Kecamatan Kecamatan Donri-Donri yaitu

100% sedangkan persentase laki-laki buta huruf tertinggi di Kecamatan Lilirilau yaitu 47,50% di banding ketujuh kecamatan yang lainnya.

4.3. Sektor Kesehatan

Selanjutnya, salah satu komponen yang turut serta dalam penanganan kesehatan selain fasilitas adalah sumber daya manusianya, dalam hal ini tenaga kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Soppeng dari segi kuantitas sebanyak 222 orang, tetapi dari jumlah tersebut tidak ada informasi tentang berapa tenaga medis laki-laki dan berapa perempuan. Data mengenai ketersediaan tenaga kesehatan/jumlah dokter di Kabupaten Soppeng Tahun 2011, dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4.
Jumlah Tenaga Kesehatan Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Dokter			Perawat	Bidan	Total	%
		Gigi	Umum	Ahli				
1	Marioriwawo	3	4	0	27	12	46	17,6
2	Liliriaja	1	3	0	16	7	44	16,8
3	Lilirilau	1	3	0	16	7	27	10,3
4	Lalabata	2	1	6	21	14	44	16,8
5	Marioriwawa	2	3	0	19	13	37	14,1
6	Donri-Donri	2	2	0	17	11	32	12,2
7	Ganra	1	1	0	8	6	16	6,1
8	Citta	1	1	0	6	3	11	4,2
Total		14	18	6	142	82	262	100,00

Sumber : Kab. Soppeng dalam angka, 2011

Berdasarkan dari data Kabupaten Soppeng dalam angka Tahun 2010, dapat diketahui bahwa terdapat 18 dokter umum dan 14 dokter gigi. Selain itu juga ada 142 orang perawat dan 82 bidan. Jika dilihat dari persentase keberadaan tenaga kesehatan pada setiap kecamatan, maka kecamatan yang paling tinggi adalah Kecamatan Marioriwawo, hal ini disebabkan karena Kecamatan Marioriwawo memiliki wilayah yang cukup luas dan penduduk paling banyak, selain itu Kecamatan Marioriwawo juga terdiri dari 13 desa/kelurahan.

4.4. Sektor Ekonomi

4.4.1. Jumlah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja

Dalam konsep ketenagakerjaan, angkatan kerja didefinisikan sebagai kelompok umur 15 tahun ke atas yang melakukan kegiatan utama bekerja dan mencari pekerjaan, sedangkan yang tidak termasuk angkatan kerja adalah mereka yang melakukan kegiatan utama seperti sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Untuk memperoleh nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah berapa jumlah penduduk yang termasuk dalam Angkatan Kerja (AK) dan Bukan Angkatan Kerja (BAK). Adapun jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tergolong dalam angkatan kerja dan yang bukan angkatan kerja di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5.

Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin

Kegiatan	Angkatan Kerja				Jumlah	(%)
	LK	%	PR	%		
Bekerja	60.732	69,71	26.391	30,29	87.123	91,68
Mencari kerja	2.479	31,35	5.428	68,65	7.907	8,32
Total	63.211	66,52	31.819	33,48	95.030	100,00
Kegiatan	Bukan Angkatan Kerja				Jumlah	(%)
	LK	%	PR	%		
Sekolah	4.725	46,88	5.353	53,12	10.078	11,48
Mengurus Rumah Tangga	399	0,83	47.736	99,17	48.135	69,15
Lainnya	6.522	57,23	4.874	42,77	11.396	16,37
Total	11.646	16,73	57.963	83,27	69.609	100,00

Sumber : Kab. Soppeng dalam angka, 2011

Tabel 5 menunjukkan bahwa jumlah yang angkatan kerja lebih banyak dibanding dengan bukan angkatan kerja. Dari 69.609 orang yang bukan angkatan kerja terdapat 48.135 orang (69,15%) yang melakukan kegiatan mengurus rumah tangga, 10.078 orang (11,48%) yang melakukan kegiatan sekolah dan 11.396 orang (16,37%) melakukan kegiatan lainnya, sementara dari 95.030 orang yang termasuk dalam golongan angkatan kerja terdapat 87.123 orang (91,68%) yang melakukan kegiatan kerja dan 7.907 orang (8,32%) melakukan kegiatan mencari kerja.

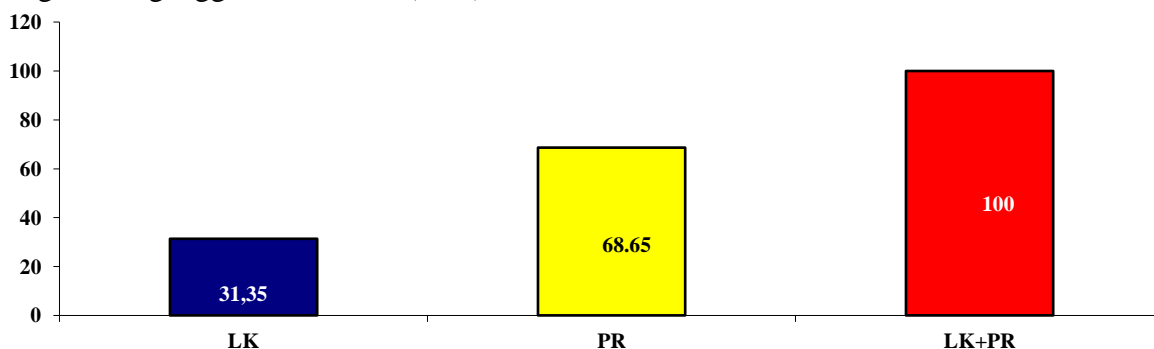
Secara umum presentase laki-laki yang bekerja jauh lebih besar dari perempuan pada golongan angkatan kerja, yaitu laki-laki 63.211 orang (66,52%) sedang perempuan cuma 31.819 orang (33,48%). Begitupun juga secara khusus pada kategori yang bekerja, presentasi laki-laki lebih tinggi yaitu 60.732 orang (69,71%) dibanding perempuan hanya 26.391 orang (30,29%). Selanjutnya kategori mencari pekerjaan, jumlah laki-laki lebih sedikit yaitu 2.479 orang (31,35%) dibanding pencari kerja perempuan yaitu 5.428 orang (68,65%). Lain halnya pada golongan bukan angkatan kerja jumlah perempuan jauh lebih banyak yaitu 57.963 orang (83,27%) dibanding laki-laki hanya 11.464 orang (16,73%), terutama dalam kegiatan mengurus rumah tangga yaitu 47.7365 orang (99,17%), sementara laki-laki hanya 399 orang (0,83%). Kenyataan ini disebabkan oleh adanya faktor sosial dan budaya yang masih mempengaruhi masyarakat di Kabupaten Soppeng yang menganggap bahwa laki-laki merupakan pencari nafkah utama bagi kelangsungan hidup rumah tangga sementara perempuan hanya pekerja untuk mengurus rumah tangga. Dimana anggapan umum tentang pekerjaan domestik perempuan dari generasi ke generasi tidak pernah diperhitungkan sebagai aset bernilai ekonomis.

4.4.2. Tingkat pengangguran terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah perbandingan antara banyaknya pencari kerja dengan banyaknya angkatan kerja. Dengan adanya data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan, maka dapat diketahui seberapa tingkat pengangguran masing-masing. Untuk lebih jelasnya TPT yang terdapat di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada grafik 1.

Diagram 1.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



Pada grafik di atas memperlihatkan bahwa TPT perempuan lebih tinggi yaitu 68,65% dibandingkan pada TPT laki-laki hanya 31,35%, hal ini dapat dipahami karena pada umumnya perempuan yang mencari kerja lebih tinggi dibanding laki-laki. Walaupun perbedaan antara tingkat pengangguran laki-laki dan perempuan di Kabupaten Soppeng tidak terlalu besar tetapi tetap perlu dipikirkan kegiatan produktif yang perlu diciptakan bagi perempuan agar mampu memberikan kontribusi yang berarti khususnya bagi keluarga.

4.5. Sektor Publik

4.5.1. Partisipasi Dalam Bidang Legislatif

Dengan adanya perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat dapat menjadi suatu ujung tombak dalam advokasi upaya pengarusutamaan serta nilai-nilai kesetaraan gender dalam produk perundang-undangan maupun penciptaan perencanaan pembangunan yang berspektif gender. Representatif perempuan dalam dewan di harapkan menjadi 'vokal poin' dalam menggali aspirasi dan pengalaman-pengalaman spesifik perempuan yang akan menjadi dasar lahirnya sebuah produk perencanaan maupun perundang-undangan yang tidak bias terhadap terhadap perempuan. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Soppeng berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6.

Jumlah anggota DPRD Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Anggota				Total	%
		LK	%	PR	%		
1	SD	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	SMP	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	SMA	5	91,67	0	8,33	5	42,86
4	D I/II	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	D III/IV	0	0	0	0,00	0	0,00
6	S1	15	88,24	2	12,50	17	56,67
7	S2 dan S3	6	75,00	2	25,00	8	26,67
Total		26	86,67	4	13,33	30	100,00

Sumber : Kab. Soppeng dalam angka, 2011

Peran serta perempuan di Kabupaten Soppeng dalam bidang legislatif dapat dilihat dari keanggotaan perempuan di DPRD. Dari 30 orang anggota DPRD hanya 4 orang (13,33%) perempuan yang duduk sebagai wakil rakyat, selebihnya 26 orang (86,67%) adalah laki-laki. Perbedaan jumlah anggota DPRD antara laki-laki dan perempuan ini sangat signifikan, sehingga dalam posisi seperti ini akan sulit bagi anggota dewan yang perempuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan agar prioritas kebijaksanaan diarahkan menuju kesetaraan gender. Dari 30 orang anggota DPRD Kabupaten Soppeng seperti terlihat pada Table 6 bahwa tingkat pendidikan sebagian besar anggota dewan berpendidikan sarjana adalah 72 orang (56,67%), sementara untuk anggota dewan yang berpendidikan pada tingkat magister dan doktor hanya sebanyak 8 orang (26,67 %).

4.5.2. Partisipasi Dalam Bidang Eksekutif

Secara umum di Kabupaten Soppeng, dari 6.868 orang PNS, 3.084 (44,90%) diantaranya adalah laki-laki dan perempuan sebanyak 3.784 orang (55,10%) yang tersebar pada beberapa dinas atau badan. Partisipasi perempuan sebagai PNS ini akan dielaborasi lebih mendalam lagi berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat/golongan, dan jabatan/kualitas, karena ketiga hal ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh/dominan untuk menentukan kualitas partisipasi perempuan. Berikut Tabel 7 yang merinci jumlah PNS di Kabupaten Soppeng berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel 7.

Jumlah PNS Berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin				Total	%
		LK	%	PR	%		
1	SD	82	95,35	4	4,65	86	1,25
2	SLTP/MTS	66	91,67	6	8,33	72	1,05
3	SLTA/SMK/MA	678	52,64	610	47,36	1.288	18,75
4	DIPLOMA	434	28,13	1.109	71,87	1.543	22,47
5	S1	1.592	45,43	1.912	54,57	3.504	51,02
7	S2	232	61,87	143	38,13	375	5,46
Total		3.084	44,90	3.784	55,10	6.868	100,00

Sumber : Kab. Soppeng dalam angka, 2011

Berdasarkan tingkat pendidikannya, umumnya PNS di Kabupaten Soppeng memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu 3.504 orang (51,02%) menyusul Diploma 1.543 orang (22,47%). Hal ini dapat mencerminkan bahwa tingkat pendidikan PNS di Kabupaten ini sudah cukup memadai. Secara rinci pada Tabel 7 dapat dilihat perbandingan antara laki-laki dan perempuan pada setiap jenjang pendidikan. Pada tingkat SD, laki-laki 82 orang (95,35%) sedang perempuan 4 orang (4,65%). Pada tingkat SLTP/MTS sebanyak 72 orang yang terdiri dari laki-laki 66 orang (91,67%) dan perempuan 6 orang (8,33%) . Pada tingkat SLTA sebanyak 1.288 orang terdiri dari laki-laki 678 orang (52,64%) dan perempuan 610 orang (47,36%). Pada tingkat Diploma sebanyak 1.543 orang terdiri dari laki-laki 434 orang (28,13%) dan perempuan 1.109 orang (71,87%). Pada tingkat Sarjana (S1) sebanyak 3.504 orang terdiri dari laki-laki 1.592 orang (45,43%) dan perempuan 1.912 orang (54,57%), dan pada tingkat

Pascasarjana (S2) sebanyak 357 orang terdiri dari laki-laki 232 orang (61,87%) dan perempuan 143 orang (38,13%).

4.5.3. Partisipasi Dalam Bidang Yudikatif

Partisipasi perempuan dalam bidang yudikatif dapat dilihat dari keterlibatan mereka dalam segi tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. Dalam hal ini, dapat dilihat dari keterlibatan mereka sebagai praktisi hukum yaitu sebagai hakim (Negeri dan Agama), Jaksa, Notaris dan Advokat/Pengacara dan PPAT, dan Penyuluh Hukum, Personil TNI dan Polisi. Untuk lebih jelasnya data mengenai praktisi hukum dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8.

Jumlah Praktisi Hukum Menurut Jenis Profesi dan Jenis Kelamin

No	Praktisi Hukum	Jenis Kelamin				Total	%
		LK	%	PR	%		
1	Hakim Pengadilan Agama	10	83,33	2	16,67	12	35,29
2	Hakim Pengadilan Negeri	4	66,67	2	33,33	6	17,65
3	Jaksa	6	75,00	2	25,00	8	23,53
4	Pengacara	3	60,00	2	40,00	5	14,71
5	PPAT	1	33,33	2	66,67	3	8,82
6	Penyuluh Hukum	0	0	0	0	0	0
Total		24		10		34	100,00

Sumber : Kab. Soppeng dalam angka, 2011

Berdasarkan 8 terlihat bahwa jumlah praktisi hukum berdasarkan jenis profesi di Kabupaten Soppeng sebanyak 34 orang, yang paling banyak adalah hakim pengadilan agama sebanyak 12 orang (35,29%), yang terdiri dari laki-laki sebanyak 10 orang (83,33%) dan perempuan sebanyak 2 orang (16,67%), kemudian Jaksa sebanyak 8 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 6 orang (75%) dan perempuan sebanyak 2 orang (25%), lalu Hakim Pengadilan Negeri sebanyak 6 orang (17,65%), yang terdiri dari laki-laki sebanyak 4 orang (66,67%) dan perempuan sebanyak 2 orang (33,33%), selanjutnya Pengacara sebanyak 5 orang (14,71%), yang terdiri dari laki-laki sebanyak 3 orang (60%) dan perempuan sebanyak 2 orang (40%), dan disusul oleh PPAT sebanyak 3 orang (8,82%), yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1 orang (33,33%) dan perempuan sebanyak 2 orang (66,67%), semetara penyuluh hukum tidak ada. Jumlah praktisi hukum bahwa dari 34 orang, Laki-laki sebanyak 24 orang (70,59%) dan perempuan sebanyak 10 orang (29,41%), ini menandakan bahwa tingkat partisipasi perempuan sebagai praktisi hukum masih kurang, hal ini dapat menjadi pertimbangan bagaimana meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan dibidang hukum.

4.5.4. Partisipasi Dalam Bidang Militer

Pada Tabel 9 berikut disajikan data mengenai jumlah personil TNI menurut pangkat dan jenis kelamin di Kabupaten Soppeng.

Tabel 9.

Jumlah Personil TNI Menurut Pangkat dan Jenis Kelamin

No	Pangkat	Jenis Kelamin				Total	%
		LK	%	PR	%		
1	Perwira Tinggi	0	0	0	0	0	0
2	Perwira Menengah	2	100	0	0	2	2,27
3	Perwira Pertama	8	100	0	0	8	9,09
4	Bintara Tinggi	6	100	0	0	6	6,82
5	Bintara	58	100	0	0	58	65,91
6	Tamtama	14	100	0	0	14	15,91
Total		88	100	0	0	88	100

Sumber : Kab. Soppeng dalam angka, 2011

Pada Tabel 9 diatas terlihat bahwa jumlah personil TNI sebanyak 88 orang dari jumlah tersebut yang paling banyak dengan pangkat Bintara sebanyak 58 orang (65,91%), kemudian dengan pangkat Tantama sebanyak 14 orang (15,91%) dan paling sedikit dengan pangkat Perwira menengah yaitu 2 orang (2,27%). Pada Tabel 9 diatas terlihat juga bahwa semua personil TNI berjenis kelamin laki-laki dan hal ini ada kemungkinan masih terkait dengan *stereotype* bahwa perempuan yang umumnya lemah lembut sehingga TNI yang terkesan tangguh dan kuat lebih cocok untuk laki-laki.

Aparat penegak hukum lainnya yaitu polisi yang berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Mereka berperan untuk menjaga dan menciptakan kedamaian serta perlindungan hukum kepada masyarakat. Adapun data personil kepolisian menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 10 berikut:

Tabel 10.

Jumlah Personil Polisi Menurut Pangkat dan Jenis Kelamin

No	Pangkat	Jenis Kelamin				Total	%
		LK	%	PR	%		
1	Perwira Tinggi	0	0	0	0	0	0
2	Perwira Menengah	5	100	0	0	5	1,44
3	Perwira Pertama	18	100	0	0	18	5,17
4	Bintara Tinggi	101	100	0	0	101	29,02
5	Bintara	218	97,32	6	2,68	224	64,37
6	Tamtama	0	0	0	0	0	0
Total		342	98,28	6	1,72	348	100

Sumber : Kab. Soppeng dalam angka, 2011

Dari Tabel 10 menunjukkan bahwa jumlah personil kepolisian berdasarkan pangkat sebanyak 348 orang, diantaranya laki-laki 342 orang (98,28%) dan perempuan hanya ada 6 orang (1,72%) dengan pangkat terbanyak adalah Bintara sejumlah 218 orang (64,37%) diantaranya laki-laki 218 orang (97,32%) dan perempuan 6 orang (2,68%), selanjutnya pangkat Perwira Pertama sebanyak 18 orang (5,17%) dan Perwira Menengah sebanyak 5 orang (1,44%).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Realitas yang terjadi di Kabupaten Soppeng yang ditinjau dari sektor kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan publik bahwa ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender semakin jelas. Dengan demikian, diperlukan rekonstruksi pemikiran secara holistik tentang kesetaraan gender khususnya di Kabupaten Soppeng agar kaum perempuan mendapatkan peran yang berkeadilan dan sesuai standar kemampuan kaum perempuan karena pada dasarnya kedudukan laki-laki sama dengan perempuan. Dengan rekonstruksi pemikiran mengenai gender juga diharapkan dapat menjadi fondasi dasar untuk meningkatkan program-program pemberdayaan perempuan yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada pembangunan di tingkat daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Rabia. (2013). **Empowerment Beyond Resistance: Cultural Ways of Negotiating Power Relations**. Women's Studies International Forum. Elsevier
- Caplan, Pat. (1987). **The Cultural Construction of Sexuality (introduction) in The Cultural Construction of Sexuality (ed) Pat Caplan**. London: Tavistock.
- Dibie, Josephine dan Dibie, Robert. (2012). **Non-Governmental Organizations (NGOs) and the Empowerment of Women in Africa**. Africa and Asian Studies. 95-122.
- Fakih, M. (2008). **Analisis Gender dan Transformasi Sosial**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Garikipati, Supriya. (2012). **Microcredit and Women's Empowerment: Through the Lens of Time-Use Data from Rural India**. Development and Change 43(3): 719-750. International Institute of Social Studies.
- Hastuti dan Respati, Dyah. (2009). **Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Perdesaan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Perdesaan (Studi di Lereng Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta)**. Jurnal. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2011). **Modul Pelatihan Fasilitator: Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang Responsif Gender (PPRG)**.
- Kevany, Kathleen dan Huisingh, Donald. (2013). **A review of progress in empowerment of woman in rural water management decision-making processes**. Journal of Cleaner Production. Elsevier.
- Khotimah, Khusnul. (2009). **Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan dalam Sektor Pekerjaan**. Jurnal Studi Gender dan Anak. Vol. 4 No. 1 Jan-Jun.
- Latu, M, Ioana dan Mast, Schmid, Marianne dan Lammers, Joris dan Bombari, Dario. (2013). **Successful female leaders empower women's behavior in leadership tasks**. Journal of Experimental Social Psychology. Elsevier.

- Lubis, Herlina, Nina. (2010). **Pemberdayaan Peran Perempuan di Bidang Politik; Dalam Perspektif Historis**. Universitas Padjadjaran.
- Metcalf, Dawn, Beverly. (2011). **Women, empowerment and development in Arab Gulf States: a critical appraisal of governance, culture and national human resource development (HRD) frameworks**. Human Resource Development International. Vol. 14. No. 2, 131-148.
- Nugroho, Riant. (2008). **Gender dan Strategi Penguru-Utamanya Di Indonesia**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Oakley, Kenneth P.(1972). **Man the Tool-Maker**. Chicago: The University of Chicago Press.
- Oyelude, A, Adetoun dan Bamigbola, A, Alice. (2013). **Woman Empowerment Through Access to Information: The Strategic Roles of Non-governmental Organizations in Nigeria**. US-China Education Review B. ISSN 2161-6248. David Publishing.
- Setyaningsih, Santi dan C.P, Rucita dan Hani, Ummu dan Rachmania, Nurul, Ilma. (2012). **Women Empowerment through Creative Industry: A Case Study**. Procedia Economics and Finance 4, 213-222. Elsevier.
- Suja, S. (2012). **Woman Empowerment Through Self-Help Group-An Evaluative Study**. Sona Global Management Review. Volume 6. Issue 3.
- Ushma D. Upadhyay dan Karasek, Deborah. (2012). **Women's Empowerment and Ideal Family Size: An Examination of DHS Empowerment Measures In Sub-Sahara Africa**. International Perspectives on Sexual and Reproductive Health. Volume 38, Number 2.